Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis
Vol. 3, No.2, April 2019
ISSN 2541-1438; E-ISSN 2550-0783
Published by STIM Lasharan Jaya

Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi Informasi, Kepercayaan Kepada Pemerintah Perhadap Prilaku Tax Evasion Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

Idris
Universitas Muslim Indonesia
idrisp961@gmail.com

ARTICLE DETAILS

History
Received : February
RevisedFormat : March
Accepted : April

Keywords :
taxes, electronic taxes, taxpayers, tax evasion

ABSTRACTS

Idris, The Effect of Possible Detection of Fraud, Information Technology, Trust in the Government Against the Behavior of Tax Evasion at the Pratama Tax Office in South Makassar. The classic question that often arises in the dynamics of the tax audit problem is why a tax audit needs to be done. This question underlies the consideration of the tax authorities or tax authorities in initiating the inspection. This is related to the informative value submitted by Taxpayers regarding tax or financial reports.

By adhering to the self-assessment system, the tax apparatus always uses the presumption of innocence. What is the meaning is wrong. If the report from the Taxpayer is tampered with again, this is not to find fault, but in order to enforce the tax law, and to carry out a process of awareness of the Taxpayers. In this perspective, the tax audit hypothesis emerges, namely the possibility of fraud detection by taxpayers, or in other words, a form of tax resistance carried out both passively and actively, namely tax avoidance, or tax evasion

The Directorate General of Taxes (DGT) especially the South Makassar KPP Pratama as an important part of the Ministry of Finance organization is ready to accept and implement information technology systems to support organizational activities. This is in line with the bureaucratic reforms that have been implemented in the Ministry of Finance. In order to fulfill the demands of futureistic and inclusive bureaucratic reform with world-class changes in public services, the finance ministry has carried out organizational reforms that focus on three main pillars, namely;

1. Pillars of Organizations, among others, through sharpening tasks and functions, grouping coherent tasks, eliminating overlapping tasks, and modernizing offices in the fields of taxation, customs and excise, treasury, state wealth, and other state financial functions.
2. Business Process Pillars, among others, through the establishment and improvement of Operating Standards Procedures that provide clarity and contain service promises, carry out analysis and evaluation of positions, implementation of rank ranking systems, and management of balance scorecard-based performance and development of various e-government application systems;
3. Pillars of HR, among others through increased discipline, development of assessment centers, Competency-based Training, implementation of merit systems, structuring human resources, SIMPEG development, and consistent implementation of reward and punishment.

Some previous researchers such as Andres (2002), Ayu (2009), Suminarsasi (2012), Permatasari (2013), and Rahman (2013) and Ardiyaksa Kusuma (2014), Trisetiawan (2018), Fidhia (2017) have examined the factors that influence tax evasion, as well as the motivation to pay taxes on location and other differences, so on this basis the researcher re-investigates the influence of the possibility of detection of fraud, information technology, and trust in the government

©2019 STIM Lasharan Jaya Makassar

*Corresponding Author Email Address: idrisp961@gmail.com
© 2019 STIM Lasharan Jaya Makassar

PENDAHULUAN

Program modernisasi di Kementerian Keuangan ini menghasilkan berbagai kemajuan dengan teknologi sebagai *main streamnya.* Hal ini merupakan bagian dari *grand design e-goverment.* Oktal et al., (2016) mengemukakan sistem informasi dan perkembangan teknologi informasi berpengaruh dalam kehidupan sosial dan bisnis di seluruh dunia. Menurut Alcaide–Muñoz et al. (2017) dalam Kara Novita (2018) *e-government* telah mendapatkan momentum diberbagai negara karena keefektifan dan kesesuaian dengan konteks pelayanan publik. E-government telah memungkinkan publik untuk mengakses informasi, menawarkan transparansi, meningkatkan penyampaian layanan, dan meningkatkan partisipasi publik dalam urusan pemerintahan. *E-government* juga telah diadopsi di institusi perpajakan Indonesia.

Untuk penyampaian SPT Tahunan aplikasi *e-filling* disediakan secara gratis oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sejak tanggal 1 Februari 2012 Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan formulir 1770-S dan 1770-SS melalui website Direktorat Jenderal Pajak secara gratis. Untuk dapat melaksanakan *e-filling* tersebut, berdasarkan PER-39/PJ/2011 Wajib Pajak harus melakukan terlebih dahulu Permohonan E-FIN (Filling Identification Number) dan Pendaftaran Kebijakan *e-Filling* (*E-Filling*, 2013, para.10).

Dengan adanya aplikasi *e-filling* yang bisa diakses secara gratis dari website Direktorat Jenderal Pajak, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi akan meningkat. Sistem *e-filing* menawarkan manfaat bagi wajib pajak, namun tidak demikian tidak semua wajib pajak memanfaatkan sistem ini. Lai, Obid dan Meera (2004), menyatakan: "*The e-filing system may offer benefits to improve administrative compliance efficiency, but the benefits gained maybe obstructed by tax user's unwillingness to accept and use the available electronic services".*

Maka penelitian ini menggabungan variabel sistem informasi, sedangkan penelitian Kara (2018) memisahkan antara variabel sistem dan informasi. Hal ini perlu dikemukakan bahwa alasan penulis adalah sebagian dimensi yang ada dalam sistim memiliki kesamaan dengan dimensi informasi. Sedangkan variabel ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, dan faktor sosial diadopsi dari Kara (2018), dan Asis (2018), dan terdapat perbedaan pada variabel dependennya, dimana Kara menggunakan variabel intervening, sedangkan asis menggunakan variabel minat menggunakan indihome.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah Kualitas Informasi berpengaruh terhadap Minat pengguna *e-filing* di KPP Pratama Makassar Selatan?
2. Apakah Faktor Kepuasan Pengguna berpengaruh terhadap Minat pengguna *e-filing* di KPP Pratama Makassar Selatan?
3. Apakah Persepsi Manfaat berpengaruh terhadap Minat pengguna *e-filing* di KPP Pratama Makassar Selatan?

LANDASAN TEORI

Konsep dan Pengertian Tax Evasion, Penggelapan pajak (*tax evasion)* adalah tindakan Wajib Pajak yang selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin dan cenderung melakukan penyelundupan pajak yang tentunya melanggar peraturan perundang-undangan (Rahayu, 2010:149). Sedangkan menurut (Anwar, 2013) Penggelapan pajak *(tax evasion)* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi Wajib Pajak dan cara penyeludupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan (Ulfa Auliya 2015).

Suminarsasi (2011) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sistem perpajakan di Indonesia yang belum optimal, disertai pemahaman Wajib Pajak yang masih rendah akan

peraturan perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor yang dapat memicu Wajib Pajak melakukan *tax evasion* (penggelapan pajak).

Beberapa Alasan Perilaku Tax Evasion, Menurut Nurmantu (2007) mengemukakan bahwa alasan Wajib Pajak melakukan tindakan *tax evasion* adalah sebagai berikut:

1. Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tertentu
2. Kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil
3. Manfaat yang diperoleh relatif besar daripada resikonya
4. Sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat
5. Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh Wajib Pajak
6. Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi

Dampak Penggelapan Pajak (Tax evasion), Menurut Gunadi (2007:6) akibat dari pengelakan pajak antara lain sebagai berikut:

1. Dalam bidang keuangan.
   Penggelapan pajak merupakan pusat kerugian bagi kas negara karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflasi dll.

2. Dalam bidang ekonomi
   Penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat antara para pengusaha. Maksudnya pengusaha yang melakukaan penggelapan pajak dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar. Sehingga perusahaan yang menggelapkan pajak memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur.

3. Dalam bidang psikologi.
   Jika Wajib Pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak, itu sama saja membiasakan untuk selalu melanggar undang-undang.

Pengertian Pemeriksaan Pajak, Definisi pemeriksaan pajak menurut Soemarso S.R (2011:112) adalah : "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Berdasarkan pengertian-pengertian dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemeriksaan Pajak***,** Menurut Siti Kunia Rahayu (2010:260) Mengemukakan. "Pemeriksaan akan berjalan lancar apabila didukung oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak". Antara lain:

1. Teknologi Informasi *(information technology)*
   Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan *Computer Assisted Audit Technique*.

2. Jumlah sumber daya manusia *(the number of human resources)*
   Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Jika jumlah tidak dapat memadai karena pengadaan sumber daya manusia melalui kualifikasi dan prosedur *recruitment* terbatas, maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan.

3. Kualitas sumber daya *(the quality of human resources)*
   Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adala dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan *reward and punishment*.

4. Sarana dan prasarana pemeriksaan *(audit facilities)*
   Sarana prasarana pemeriksaan seperti komputer sangat diperlukan

Kendala yang Dihadapi Pemeriksaan Pajak, Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:261), antara lainnya :

1. Psikologis
Persepsi Wajib Pajak tentang pemeriksaan pajak dan persepsi pemeriksa pajak mengenai kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi yang terbentuk pada Wajib Pajak maupun pemeriksa pajak sangat tergantung pada penguasaan informasi. Apabila timbul ketimpangan informasi (*assymetric information*), maka akan timbul masalah psikologis antara kedua belah pihak. Wajib Pajak timbul penolakan, pemeriksa timbul kecurigaan.

2. Komunikasi

Terdiri dari komitmen Wajib Pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasan sementara temuan hasil pemeriksaan. Komitmen wajib pakal timbul apabila Wajib Pajak memahami tujuan pemeriksaan dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta hak dan kewajiban pemeriksa. Selain itu temuan sementara pemeriksaan pajak hendaknya disampaikan lebih dini untuk memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak menjelaskan dan memberikan buku, catatan atau dokumen tambahan yang mendukung penjelasan-penjelasannya. Apabila komunikasi tidak kondusif maka hal ini dapat menghambat jalannya pemeriksaan pajak.

3. Teknis

Terdiri dari ukuran (*size*) perusahaan, pemanfaatan teknologi informasi, kepemilikan modal (*structure of ownership*), cakupan transaksi. Semakin kompleks variable teknis akan berdampak terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak.

4. Regulasi

Terdiri dari kelengkapan ketentuan yang berlaku yang mengatur perlakuan atas setiap transaksi yang timbul dan sejauh mana jangkauan hak pemajakan undang-undang domestic atas transaksi internasional

Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teori yang duganakan sebagai dukungan riset dalam penelitian ini terutama berkaitan dengan perilaku *tax evasion* dimulai dari Teori TPB atau *Theory of Planned Behavior* atau perilaku yang direncanakan, merupakan suatu sikap yang berpengaruh terhadap perilaku dimana proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan sebagai perantaranya dan dapat berdampak pada hal-hal tertentu saja (Ajzen, 1991) sebagaimana diadopsi oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain Jogiyanto (2007) kemudian Ockey (2017), Fidhia (2017) dan Irma (2017).

Ada 3 indikator yang digunakan dalam teori TPB mengenai pengukuran control keprilakuan Wajib Pajak, yaitu *(1)* Kemungkinan diperiksa oleh pihak fiskus, (2) Kemungkinan dikenakannya sanksi dan (3) kemungkinan adanya pelaporan dari pihak ketiga (Bobek dan Harfiled, 2003). Hubungan dari teori ini dengan tindakan *tax evasion* adalah rasionalitas akan mempengaruhi penentuan perilaku tindakan penggelapan pajak individu.

Kecurangan pajak adalah suatu realitas yang sebenarnya dikonstruksi oleh orang-orang yang berada dalam sistem perpajakan termasuk unsur-unsur sistem perpajakan itu sendiri. Mansury (1994) dalam Mangoting Yenni dkk (2017) menyebutkan tiga unsur sistem perpajakan, yaitu kebijakan perpajakan, ketentuan undang undang perpajakan, dan aspek administrasi perpajakan. Selain keterlibatan unsur-unsur tersebut, peran konsultan pajak menempati posisi penting dalam perilaku kepatuhan Wajib Pajak (Devos, 2012).

Teori Atribusi, Atribution Theory (Harold Kelley, 1972-1973) dari Harold Kelley adalah teori atribusi yang paling terkenal diantara teori atribusi lainnya. Teori ini diperkenalkan oleh Fritz Heider (1958) pertama kali mengenai atribusi kausalitas. Atribusi merupakan proses menyimpulkan motif, maksud, dan karakterisik orang lain dengan melihat pada perilakunya yang tampak. Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan.

Teori Konflik oleh Karl Marx, Menurut teori konflik, bahwa indikasi sebuah kejahatan terkait erat dengan perkembangan kapitalisme. Jika dihubungkan dengan penelitian ini, maka Perilaku menyimpang (penyampaian laporan SPT yang tidak sesuai UU) dibuat oleh Wajib Pajak untuk melindungi kepentingan sendiri. Hukum merupakan cerminan kepentingan kelas yang berkuasa dan sistem peradilan pidana mencerminkan kepentingan mereka.

Teori Perilaku, Ajzen dan Fishbein (1980) dalam Azwar (2002) merumuskan *theory of reasoned action* yang menjelaskan bahwa perilaku manusia pada dasarnya dilakukan atas kemauan sendiri. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa Wajib Pajak yang diperiksa, umumnya melakukan pengisian SPT dengan cara-cara yang masuk akal, mempertimbangkan semua informasi yang ada, dan memperhitungkan implikasi tindakan mereka.

Praktek Penghindaran Pajak, Dyreng, Hanlon, & Maydew, (2008) dalam Aryani Y. Anni (2016) mengemukakan penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan memanfaatkan kelemahan regulasi untuk memperoleh *outcome* pajak yang menguntungkan. Penghindaran pajak merupakan pengurangan tarif pajak eksplisit yang merepresentasikan serangkaian strategi *tax planning* yang berawal dari manajemen pajak (*tax management*), perencanaan pajak (*tax planning*), pajak agresif (*tax aggressive*), *tax evasion*, dan *tax sheltering* (Hanlon & Heitzman, 2010).

Suprianto & Dewi, 2014). Mengemukakan bahwa Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah kemampuan perusahaan untuk membayar jumlah kas pajak/ *cash-effective tax rate* terhadap laba sebelum pajak pada perusahaan (Dyreng *et al.*, 2008). Penghindaran pajak secara luas yang dikemukakan oleh Hanlon & Heitzman (2010) adalah pengurangan tarif pajak yang merepresentasikan serangkaian strategi perencanaan pajak mulai dari manajemen pajak (*tax management*), perencanaan pajak (*tax planning*), pajak agresif (*tax aggressive*), *tax evasion*, dan *tax sheltering*. *Teknologi informasi,* Darono Agung (2012) Organisasi dan masyarakat seharusnya tidak lagi memandang implementasi sistem informasi berbasis teknologi informasi hanya dengan menggunakan sudut pandang determinisme teknologi.

PEMBAHASAN

Pengaruh Terdeteksinya Kecurangan terhadap Perilaku Tax Evasion, Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh Kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap perilaku *tax evasi*on ditemukan bahawa Deteksi kemungkinan terjadinya kecurangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Dengan Hasil ini menunjukkan bahwa dengan mendeteksi kecurangan wajib pajak, maka kecenderungan perilaku penggelapan pajak akan menurun.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ayu (2009) yang menegaskan bahwa semakin ketat deteksi atas kecurangan pajak yang dilakukan, maka semakin sedikit kemungkinan kecenderungan wajib pajak melakukan aksi penggelapan pajak. Ketika wajib pajak menganggap persentase tingkat terdeteksi kecurangan melalui pemeriksaan pajak tinggi,

maka mereka akan cenderung patuh terhadap peraturan pajak sehingga mereka tidak melakukan tindakan penggelapan pajak karena mereka takut terbukti melakukan tindakan kecurangan sehingga dapat terkena sanksi perpajakan yang berupa denda.

Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Perilaku Tax Evasion**,** Penelitian menemukan bahwa Teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Dengan Hasil ini menunjukkan bahwa secara perhitungan statistik Dengan hasil ini maka hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Dengan hasil ini, maka penelitian ini sesuai dengan terori yang digunkan dalam penelitian ini, yang menyatakan bahwa Teknologi informasi memiliki peranan penting dalam perekayasaan sebagian besar proses bisnis. Kecepatan, kemampuan pemrosesan informasi, dan konektivitas komputer serta teknologi internet dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis.

Penelitian ini didukung oleh teori pengadopsian teknologi. Teknologi informasi adalah seperangkat alat untuk membantu dalam memudahkan pelaksanaan tugas melalui proses informasi (Haag dan Keen, 1996:29). Sedangkan menurut Martin seperti yang dikutip oleh Kadir (2003:2) Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (seperangkat alat keras dan lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan yang mencakup teknologi informasi untuk mengirimkan informasi. Teknologi informasi secara *de facto* sudah menjadi landasan untuk melakukan bisnis.

Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap perilaku Tax Evasion. Hasil ini menunjukkan bahwa secara perhitungan statistik Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap perilaku *tax evasion*. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap perilaku *tax evasion* terbukti.

Hasil penelitian mendukung pandang para ahli yang menyatakan bahwa Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis.

Berdasarkan jawaban responden, dan jika dikaitkan dengan indikator variabel kepercayaan yaitu Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan, Kepercayaan kepada sistem hukum, Kepercayaan terhadap politisi, Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dikembalikan kembali ke rakyat. Responden memberikan jawaban yang cukup dengan pernyataan dalam variabel kepercayaan ini.

Dari jawaban responden hanya terdapat satu pernyataan yang berniali mean 4,0 yaitu pernyataan Pemerintah telah berupaya melakasanakan penegakan hukum dengan baik. Hal ini berarti bahwa, pemerintah melalui lembaga peradilan formal dan independen telah berupaya dengan baik dalam menumpas perilaku korupsi di Indonesia. Perlu peneliti tegaskan disini bahwa ada upaya yang harus kita hargai.

DAFTAR PUSTAKA

A Baron, Robert dan Donn Byrne. 2003. Psikologi Sosial edisi sepuluh. Airlangga : Jakarta.

Ajzen, I., & Fishbein, M., 1975, *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An 235 273).Chicago: The University of Chicago Press.*

Ajzen, I., & Fishbein, M., 1980, *Understanding Attitudes and Predicting SocialBehavior*, 83-111, Prentice-Hall, Englewood Scliffs, New York.

Ajzen, I., 1985, From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior dalamJ. Kuhl & J. Beckman, Eds., *Action-control: From Cognition to Behavior,*11-39, Springer, Heidelberg.

Ajzen, I., 1991, The Theory of Planned Behavior, *Organizational Behavior andHuman Decision Processes,* 50, 179-211.

Alm, J. (1999). *Tax Evasion. In J. J. Cordes, R. D. Ebel & J. G.Gravele (Eds.), Encyclopedia of Taxation and Tax Policy (pp.354356).Washington, D.C.: The Urban Institute Press.*

Alm, J., Erard, B., & Feinstein, J. S. (1996). *The Relationshipbetween State and Federal Tax Audits. In M. Feldstein, Poterba*

Alm, J., Jackson, B., & McKee, M. (1992a). *Deterrence and Beyond:Toward a Kinder, Gentler IRS. In J. Slemrod (Ed.), Why People PayTaxes (pp. 311329). Ann Arbor: The University of Michigan Press.*

Alm, J., Jackson, B., & McKee, M. (1992b). *Estimating the Determinants of Taxpayer Compliance with Experimental Data.National Tax Journal, XLV(1), 107 114.*

Alm, J., Jackson, B., & McKee, M. (2004). *Audit Information Dissemination, Taxpayer Communication, and Compliance: An Experimental Approach. Retrieved January 14, 2005, 2004, fromhttp://www.irs.gov/pub/irssoi*

Dayakisni, Tri & Hudaniah. (2006). Psikologi Sosial. Yogyakarta: UMM Press

Azwar, Saifuddin.2012.Penyusunan Skala Psikologi. Pustaka Pelajar : Yogyakarta

Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972).Income Tax Evasion: A TheorethicalAnalysis. *Journal of Public Economics,* dalam Mangoting Yenni dkk (2017) Menguak Dimensi Kecurangan Pajak. Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL Volume 8 Nomor 2 Halaman 227-429 Malang, Agustus 2017 ISSN 2086-7603 e-ISSN 2089-5879.

Rablen, M. D. (2010). Tax Evasion and ExchangeEquity Approach. *Public FinanceReview, 38*(3), 282-305. https

Levaggi, R., & Menoncin, F. (2013). OptimalDynamic Tax Evasion. *Journal of EconomicsDynamics and Control, 37* (11),2157-216.

Ulfa Auliya (2015) Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Kepercayaan Pada Otoritas Pemerintah Terhadap Penggelapan Pajak (studi empiris pada orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama senapelan pekanbaru). Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.

Suminarsasi W & Supriyadi .2012.*Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion),SNA XV,* Banjarmasin.

Ardyaksa, Kusuma, Theo. 2014.*Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi dan Infor masi Perpajakan Terhadap Tax Evasion.* Semarang: Uni versitas Negeri Semarang.

Geovanni Lutfie dkk (2016) pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan kesesuaian tugas – teknologi informasi terhadap kinerja individual instansi pemerintahan (studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama malang selatan). Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1 2016.

Safitri Alfiah; pengaruh religiusitas dan *detection rate* terhadap penggelapan pajak. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Kukaj Halil dan Gashi Mentor (2016). *The Effect of Tax Rates on Fiscal Evasion andAvoidance. European Journal of Sustainable Development* (2016), **5**, 1, 31-38 ISSN: 2239-5938 *Doi: 10.14207/ejsd.2016.v5n1p31*.

Budi Santoso (2012). pengaruh *perceived usefulness, perceived ease of use,* dan *perceived enjoyment* terhadap penerimaan teknologi informasi (studi empiris di kabupaten sragen). Jurnal Studi Akuntansi Indonesia.

Darono Agung (2012) Penggunaan Teori Institusional Dalam Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2012 (SNATI 2012) ISSN: 1907-5022 Yogyakarta, 15-16 Juni 2012.

Ancok Djamaluddin (2004). Psikologi Terapan Yogyakarta, Darussalam, 2004

Titiek Puji Astuti dan Y. Anni Ary (2016). tren penghindaran pajak perusahaan manufaktur di indonesia yang terdaftar di bei tahun 2001-2014 Jurnal Akuntansi/Volume XX, No. 03, September 2016: 375-388.

Dyreng, S.D., Hanlon, M. & Maydew, E.L., (2008) "Long-run Corporate Tax Avoidance". *The Accounting Review,* 83(1), 61-82. Dalam Titiek Puji Astuti dan Y. Anni Ary (2016).

Blaylock, Bradley., Shevlin, T.,& Wilson, R. J., (2012) "Tax Avoidance, Large Positive Temporary Book-Tax Differences, and Earnings Persistence". *The Accounting Review,* 87 (1): 91–120.

Atwood, T.J., Drake, M. S., & Myers, L. A. (2012) "Home country tax system Characteristics and corporate tax avoidance: international Evidence". *The Accounting Review,* 87 (6): 1831-1860.

Deak, D. (2009) Legal Considerations of Tax Evasion and Tax Avoidance. *Society & Economy,* 26 (1): 41-85.

Fontanella, Amy & Martani, Dwi. (2014) Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap book tax *differences* (BTD) pada perusahaan *listed* di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.

Nuritomo & Martani, D. (2014) Insentif pajak, kepemilikan, dan penghindaran pajak perusahaan (Studi penerapan peraturan pemerintah No. 81 tahun 2007). *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.

Oktavia & Martani, D. (2013) "Tingkat pengungkapan dan penggunaan derivatif keuangan dalam aktivitas penghindaran pajak". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia,* 10 (2) Juni: 129-146.

Prakoso, Kesit Bambang. (2014) Pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.

Sirait, Nora S & Martani, D. (2014) Pengaruh perusahaan keluarga terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia dan Malaysia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII.*

Suprianto, Edy & Dewi, Arum K. (2014) Relevansi prinsip konservatism wajib pajak melakukan *tax avoidance* sebelum dan sesudah pelaksanaan IFRS. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.

Hanlon, M., & Shevlin, T. (2005) "*What does aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement". Journal of Public Economics*, 93, 126-141.

----------. & Heitzman, S.,. (2010) "A Review of Tax Research". *Journal of Accounting and Economics*, 50, 127-178.

Lim, YD. (2011) "*Tax avoidance, cost of debt and shareholder activism: Evidence from Korea*". *Journal of Banking & Finance*, 35: 456–470.